

## Perlawanan DI/TII Terhadap Negara (Studi Terhadap Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan)

Hariato

Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
\*e-mail korespondensi: harianto18001@gmail.unpad.ac.id

*Received 31 October 2019; Received in revised form 24 January 2022; Accepted 24 January 2022*

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang letar belakang munculnya DI/TII dan bagaimana sikap pemerintah terhadap kelompok separatis ini, utamanya DI/TII pada wilayah Sulawesi Selatan yang di nahkodai oleh Qahar Muzakkar, dari hasil kekecewaan terhadap pemerintah hingga masuk dalam kelompok Darul Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitatif deskriptif dengan menggunakan perspektif sejarah, dengan melihat bagaimana dan apa terbentuknya DI/TII serta bagaimana perspektif politik keamanan melihat peristiwa ini. Hasil pembahasan terbagi atas dua bagian, yang pertama membahas tentang klaim historis pejuang gerilya. Klaim historis oleh para pejuang gerilya yang di pimpin oleh Qahar Muzakkar dimana ingin mendapatkan akomodasi yang layak dari pemerintah atas perjuangannya dalam perang revolusi. Bagian kedua, membahas tentang sikap negara terhadap DI/TII, ini melihat bagaimana negara melakukan penumpasan terhadap DI/TII di Sulawesi Selatan. Dengan cara Perundingan hingga perang pemerintah lakukan untuk meredam pemberontakan ini. Dan pada kesimpulan membahas kedua bagian dari pembahasan tersebut.

**Kata kunci:** nii, qahar muzakkar, di/tii sulawesi selatan.

### Abstract

*This paper examines the backlash of the emergence of DI/TII and how the government behaves towards this separatist group, especially DI/TII in the South Sulawesi region which was commanded by Qahar Muzakkar, from the results of disappointment with the government into the Darul Islam group. The method used in this research is qualitative descriptive by using a historical perspective, by looking at how and what DI/TII formed after how the security political perspective saw this event. The results of the discussion are divided into two parts, the first discussing the historical claims of guerrilla fighters. Historical claims by guerrilla fighters led by Qahar Muzakkar where they wanted to get decent accommodation from the government for their struggle in the revolutionary war. The second part, discusses the attitude of the state towards DI/TII, this looks at how the state has carried out a crackdown on DI/TII in South Sulawesi. By way of negotiations until the war the government did to reduce this rebellion. And the conclusions discuss the two parts of the discussion.*

**Keywords:** nii, qahar muzakkar, di/tii south celebes.

### PENDAHULUAN

Politik dan islam memang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah negara yang mayoritas berpenduduk muslim politik islam sering dipandang sebagai penggabungan antara politik dan islam, kadangkun akan terjadi konflik besar pada sebuah negara tentang menen tukan

ideologi dan dasar negara. Seperti pada negara Iran pada tahun 1979, revolusi Islam yang menggulingkan kerajaan Iran yang dianggap memiliki sistem politik yang otoriter. Begitupun sebaliknya pada negara Aljazair, pada saat pemilu 1990-an Partai Front Keselamatan Islam (FIS) ditindas dengan keras karena mengguguli

partai pemerintah yang otoriter (Esposito J.L. et, 1999). Serta masih banyak lagi fenomena-fenomena di Timur Tengah Gerakan yang mengancam kedaulatan pada sebuah negara, dan di Indonesia gerakan pemberontakan DI/NII yang ingin membentuk Negara dengan Syariat Islam pada masa orde baru dan Hizbut Tahrir Indonesia dengan tujuan membentuk negara khilafah.

Sebelum munculnya Darul Islam (DI) yang dipelopori Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo yang lahir di Cepu 7 januari 1905 (Damien Dematra, 2011), Kartosoewirjo tergabung dalam Jong Java pada tahun 1923 tak lama tepatnya 2 tahun berlangsung Jong Java terpecah karena adanya dualisme ideologi yakni cita-cita keislaman dan Nasional sekuler. Kemudian Kartosoewirjo bergabung dalam Jong Ilamieten Bond (JIB) dan memimpin di Cabang Surabaya. Dari JIB ini lah Kartosoewirjo berkenalan dengan H.O.S Cokroaminoto, pada tahun 1927 Kartosoewirjo bergabung dengan Partai Serikat Islam (PSI) yang berubah nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan pada tahun 1936 terpilih sebagai ketua muda PSII.

Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana perlawanan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII) terhadap Negara dan begitupun sebaliknya bagaimana negara menyikapi DI/TII khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Pada awalnya gerakan Darul Islam (DI)

merupakan gerakan social yang di komandoi oleh S.M. Kartosoewirjo, hal ini sebagai respon terhadap penjajahan Belanda yang belum selesai pasca kemerdekaan dan juga merupakan protes terhadap Jawa Barat yang hanya sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) (Supyan, M.D, 2016). RIS merupakan hasil perjanjian Linggarjati dan Renville dari Konfrensi Meja Bundar antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda. Maksud dari Gerakan ini yaitu menginginkan Indonesia berdaulat sepenuhnya atas kemerdekaan yang sudah di Proklamasikan. Perlahan namun pasti dari semangat dan keinginan yang begitu kuat Kartosoewirjo mendirikan Negara Islam Indonesi (NII) yang berlandaskan Syriat Islam, menurutnya ini merupakan jalan tengah dari Belanda dan Indoensia yang pada saat itu sibuk menentukan Konsep dasar Negara. Namun, Konsep negara bersyariat Islam dari Darul Islam Negara Islam Indonesia tidak berhasil akibat mendapatkan perlawanan terhadap negara.

Kartosoewirjo sebetulnya beberapa kali ingin memproklamirkan Negara Islam Indonesia melalui kyai Yusuf Taudjiri namun hal itu ditolaknya tepatnya pada tahun 1945 dan 1948, dan barulah pada 7 agustus 1949 Kartosoewirjo memproklamirkan sendiri Negara Islam Indonesia, pada saat itu pulalah negara menganggap gerakan Kartosoewirjo ini adalah gerakan yang separatis dan

mengancam kedaulatan negara dan akhirnya diburu oleh pemerintah pada saat itu.

Gerakan Darul Islam yang ingin membentuk Negara Islam Indonesia ini memberontak melalui Tentara Islam Indonesia dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia yakni Jawa Barat dipimpin oleh S.M. Kartosoewirjo, Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah, Sulawesi Selatan dipimpin oleh Qahar Muzakkar, Aceh dipimpin oleh Daud Beureueh dan Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hadjar

Jika melihat ulasan sebelumnya yang mengatakan bahwa DI awalnya adalah *social movement* atas penolakan hasil Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan Indonesia menjadi Negara Federal dan masih di control oleh Belanda. Namun pada literatur lain dalam rilis Nafiun.com di mana mengulas pemberontakan DI/TII di Indonesia mengatakan bahwa kontak senjata pertama antara Tentara Indonesia dengan TII, berlangsung pada saat Pasukan Siliwangi (Tentara Indonesia) pindah ke Jawa Tengah dan di perjalanan bertemu dengan Tentara Islam Indonesia, saat itu Tentara Islam Indonesia di bantu oleh Tentara Belanda sehingga menghasilkan peran sengit.

Melihat hal tersebut dari gerakan social DI menuju gerakan separatisme yang memberontak ingin mengganti Ideologi Negara menjadi Syariat Islam, kita masih

melihat bahwa Belanda masih memiliki peran penting dalam membuat kekacauan di Indonesia salah satunya menjadikan Indonesia Negara Federal dan membantu TII memberontak dan menjadi ancaman ketahanan Negara.

Gerakan DI/TII Sulawesi Selatan di nahkodai oleh Kolonel Qahar Muzakkar, dalam diskusi Bersama Muzakkar yang juga salah satu Mahasiswa Pascasarjana Unpad yang sekaligus Salah satu dosen di perguruan tinggi di Luwu Sulawesi Selatan bahwa Qahar Muzakkar memiliki nama panggilan yaitu "Ladomeng", arti kata Ladomeng dalam bahasa Bugis "Orang yang suka main Domino". (Hasil Diskusi Bersama Muzakkar). Sebagaimana warga Sulawesi Selatan menganggap bahwa Qahar Muzakkar adalah seorang Pahlawan dan sebagainya pula menganggap bahwa ia adalah Pemberontak.

Awal mula dari gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan karena kekecewaan Qahar Muzakkar dimana banyaknya mantan anggota dari Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang diketuainya tidak diterima masuk ke Tentara Nasional Indonesia (TNI), sementara disisi lain mantan anggota KNIL diterima dengan mudah, kekecewaan itulah yang membuat Qahar Muzakkar bergabung dengan DI/TII Kartosoewirjo yang bergerak di Jawa Barat dan Qahar Muzakkar bergerak di tanah Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan gerakan ini besar hanya di daerah dataran tinggi yakni daerah Enrekang, Toraja dan

sekitarnya. Tulisan ini ingin mengetahui bagaimana sikap negara terhadap DITII.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Histoty, karena sifat data yang dikumpulkan tidak menggunakan alat-alat pengukur. Sebagian data bersumber dari Kajian Pustaka, yaitu buku bacaan, artikel, makalah, jurnal, majalah/surat kabar, internet dan juga bersumber dari berupa kata-kata ungkapan tertulis maupun lisan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Klaim Historis Pejuang Gerilya**

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang ingin membentuk sebuah Negara Bersyariat Islam atau Negara Islam Indonesia disinyalir sebagai akar terorisme yang terjadi di Indonesia, dalam penelitian M. Zaki Mubarak yang berjudul *dari NII ke ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer*. Jurnal ini membahas akar terorisme yang ada di Indonesia dan Darul Islam merupakan awal dari gerakan Islam radikal yang terjadi di Indonesia dan kemudian pada berlajut pada orde baru ditandai munculnya gerakan komando Jihad 1970-an hingga 1980-an yang beberapa actor utamanya masih ada hubungan dengan DI/TII yakni mantan anggota era Kartosoewirjo. Actor utamanya ialah Abdullah Sungkar dan Abu

Bakar Ba'asyir yang dikenal sebagai Amir Jamaah Islamiyah (JI) dan berlanjut pada kelompok-kelompok setelahnya (Zakir, 2015: 81).

Darul Islam sebagai kelompok Separatisme di Indonesia dengan Ideologi Syariat Islamnya memberontak di beberapa wilayah Indonesia seperti yang telah di bahas pada pendahuluan, salah satu wilayah pemberontakannya di Sulawesi Selatan yang di nahkodai oleh Qahar Muzakkar dalam penelitian Esther Velthoen yang dirangkum dalam buku *Antar Daerah dan Negara Indonesia tahun 1950an*. Konflik dimulai dari tentang siapa yang diterima dalam tantara dan kemasalah yang lebih pribadi bahwa Qahar ditolak menjabat sebagai jendral divisi Hasanuddin yang bermarkas di Sulawesi (Sita & Renco, 2011: 196).

Menurut Qahar Batalion Hasanuddin harus mencakup semua pejuang yang terlibat dalam revolusi. Namun, pemerintah pada saat itu tidak menerima semua mantan pejuang kemerdekaan tersebut. Dengan alasan apabila menerima semuanya maka akan melebihi kapasitas finansial pemerintah. Alasan Qahar tidak diberi posisi Komandan Divisi Hasanuddin, meski Qahar sudah mencapai Letnan Kolonel, yang dikhawatirkan kecenderungannya antifeodalnya dapat mengakibatkan revolusi social terhadap kaum aristocrat di Sulawesi Selatan, selain itu Qahar juga Cuma memiliki Pendidikan di Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo, yang

dipandang kurang dalam seorang jendral tantara professional (Sita & Renco, 2011: 197). Dalam studi politik keamanan memang tantara jika kepentingannya tidak diakomodir oleh pemerintah maka mungkin saja akan melakukan kejahatan bagi negara (Muradi, 2005: 213) dan mengancam ketertiban negara, dan inilah yang terjadi pada Qahar Muzakkar yang Kepentinannya tidak di akomodir pemerintah pada saat itu.

Pemerintah pada saat itu berusaha mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Sulawesi Selatan, dengan perundingan-perundingan masalah pengurangan jumlah penggabungan satuan-satuan tentara menemui jalan buntu dan Qahar tetap pada prinsipnya, dan Pada bulan juli 1950 Qahar Muzakkar bergabung dengan seitar 20.000 prajurit yang menolak untuk didemobilisasikan. Setelah perundingan selanjutnya gagal, Qahar lari ke daerah pegunungan dan dari wilayah itulah Qahar melancarkan aksi pemberontakan secara terbuka. Dan pada tahun 1952 Qahar menghubungi Kartosoewirjo dan secara resmi menjadikan pemberontakannya sebagai gerakan Darul Islam (Ricklefs, 2008: 507). Dengan tujuan membentuk Negara Islam Indonesia yang Bersyariat Islam. Qahar Muzakkar memproklamasikan Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1953. (Arsip Nasional RI Ujung Pandang, Arsip Muhammad Saleh Lahade,

1937-1973, No. Reg. 191) yang berlokasi di Buntu Susu (Baraka) yang terletak di Kabupaten Enrekang, dan sekaligus menjadi markas DI/TII di Sulawesi Selatan.

Sebelum terjadinya pemisahan Negara Indonesia Timur di bawah kepemimpinan Qahar Muzakkar, terjadi perbedaan pendapat di Jakarta mengenai posisi Qahar Muzakkar untuk menangani kaum pemberontak di wilayah Indonesia Timur yang menginginkan federalisme. Namun keinginan tersebut, ditolak mentah-mentah Kolonel Kawilarang dari Minahasa sebagai komandan wilayah Indonesia Timur yang ditunjuk pemerintah pusat. Kemudian Kolonel Kawilarang secara sepihak mengeluarkan dekrit pembubaran KGSS (Kelompok Gerilya Sulawesi Selatan).

Penolakan inilah yang membuat Qahar Muzakkar marah dan selanjutnya bergabung dengan kelompok gerilya dan mulai memblokir jalan-jalan utama Sulawesi Selatan. Perseteruan Militer dengan kelompok Qahar Muzakar semakin meruncing sampai terjadi kesepakatan sementara, para gerilyawan dilebur menjadi "Corps Tjadangan Nasional" (CTN) yang terdiri atas lima batalyon. Proses seleksi gerilyawan dianggap tidak adil oleh kelompok Kahar Muzakkar ditanggapi dengan cara perang gerilya dan mereka mendapat gelar "Tentara Hutan" (Zid & Sofjan, 2009: 42).

Wilayah pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan sekitar dataran tinggi Kabupaten Enrekang (Pegunungan

Latimojong) dan di daerah paling Selatan pulau Sulawesi yaitu Kabupaten Bulukumba. Baraka (Enrekang) menjadi tempat proklamasi pada 7 Agustus 1953 dan sekaligus menjadi markas besar DI/TII pada waktu itu. Qahar memiliki sekitar 7.000 bawahan yang bertempat pada masing-masing batalyon. Pasukan ini memiliki lima batalyon yang berlokasi di Pinrang, Luwu, Enrekang, dan Bonthain (Aisyah, 2018: 51). Batalyon I: Bau Massepe, Parepare, Komandan Andi Selle. Batalyon II: Batuputih, Palopo, Komandan Andi Tenriajeng. Batalyon III: Arif Rate, Bonthain, Komandan Asis Taba. Batalyon IV: Wolter Monginsidi, Enrekang, Komandan Andi Sose. Batalyon V: 40.000. Rappang, Komandan Syamsul Bahri.

Setelah Qahar menarik diri dan menanggalkan jabatannya, ia kemudian lari ke daerah Enrekang, di Enrekang Qahar dibawah oleh Andi Sose dan di bawa ke daerah Baraka, di Barakalah Qahar mengatur strategi dan membentuk pertahanan. Andi Sose dan Usman Balo sebagai orang kepercayaan Qahar dalam menyampaikan konsep ketatanegaraan yang dicita-citakannya kepada masyarakat. Namun perlahan pemikiran Andi Sose sudah mulai tidak sejalan dengan Qahar, dan Andi Sose sendiri bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Hal ini membuat Qahar kehilangan beberapa pasukannya. Namun, ini juga sebagai angin segar bagi DI/TII dimana dengan

kecerdasan Qahar ia bekerja sama dengan mantan bawahannya tersebut dalam melakukan suplai persenjataan melalui perdagangan (Aisyah, 2018: 56-57).

Sementara di Kabupaten Bulukumba sebagai bagian dari batalyon III, untuk memperkuat kedudukannya DI/TII membentuk pemerintahan Sipil di tiap-tiap distrik, dengan nama Kepala pPemerintahan Militer Distrik (KPMD), Komando distrik territorial (KDT), mengangkat Imam Desa sekaligus sebagai Kepala Desa, Rukung Kampung (RK) dan Guru Kampung (GK) (Widia, 2018: 82). Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh DI/TII di Bulukumba, mereka melakukan aksi penculikan dan perampasan harta benda, mereka juga melakukan kekerasan hingga pembunuhan, pembakaran knator oemerintahan dan rumah warga serta aksi sabotese dengan memutuskan kawat-kawat telepon.

Pemberontakan DI/TII ini bersamaan dengan krisis politik di Indonesia dan pengangkatan Hamengkubowono IX sebagai Meteri pertahanan. Disisi lain pemberontakan oleh PKI, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Republik Maluku Selatan (RMS) dan letupan-letupan kecil di berbagai daerah (Zid & Sofjan, 2009: 44) juga menambah ketidakstabilan negara pada saat itu semakin parah. Dimana negara harus benar-benar bekerja ekstra, dan melalui TNI Negara menumpas gerakan-gerakan pemerontakan tersebut. Pemberontakan-pemberontakan itu

membuat Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, langsung dihadapkan dengan adanya permasalahan-permasalahan yang serius. Situasi ini membuat Indonesia mengalami hal-hal yang sulit dalam bidang keamanan dan kesejahteraan (Sandhaussen, 1986: 90).

Jika melihat perjuangan Gerilya yang dilakukan oleh Qahar Muzakkar dan kelompoknya serta ditarik pada politik militer yakni klaim historis. pejuang yang terlibat dalam perang revolusi tidak bisa kita hindarai untuk membahas DI/TII, para pejuang gerilya di bawah pimpinan Qahar Muzakkar memang punya hak atas pengklaiman terhadap apa yang telah mereka lakukan dan memang wajar jika mereka meminta matan pejuang gerilya tersebut masuk dalam Tentara Nasional Indonesia. Klaim sejarah ini ditegaskan lagi dengan adanya budaya berkarakter militeristik, yang ditandai dengan adanya unsur militeristik dalam struktur masyarakat (Ulf Sandhaussen, 1986: 23).

## **2. Sikap Negara (Penumpasan) Terhadap Gerakan DI/TII**

Diproklamasikannya Negara Islam Indonesia oleh Qahar Muzakkar membuat hubungan hubungan semakin terpecah anantara Darul Islam dengan Republik Indonesia. Namun dalam Kawasan daerah kekuasaan DI/TII sebagian menolaknya dengan alasan mengedepankan Pancasila sebagai dasar negara. Pemberontakan yang berlangsung lebih dari satu

dasawarsa ini membuat kekacauan yang serius dan membuat pemerinth harus bekerja keras dalam menumpas Gerakan DI/TII yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia.

Salah satu pemberontakan yang benar-benar sebagai ancaman besar pada saat Pemilu 1955, dimana Darul Islam menggagalkan hal tersebut di beberapa wilayah, serta menculik Petugas Pemilu pada saat itu. Dua Pejabat Department Penerangan terbunuh pada saat melakukan sosialisasi pemilu dengan memutar film Pemilu ke daerah-daerah pedalaman, anggota petugas pemilu dibunuh, warga desa yang mendaftar di ancam, dan administrasi para pemilih dihancurkan (Sita & Remco, 2011: 200).

Operasi senyap salah satu operasi penyelamatan Militer terhadap Pastor Vesterden yang diculik oleh pasukan DI/TII di Toraja. Dalam surat Pastor tersebut mengatakan bahwa ia diculik oleh anggota DI/TII dan diperlakukan dengan baik oleh anggota DI/TII. Pastor ini berhasil dimanfaatkan baik oleh Qahar Muzakkar dimana untuk memantau radio-radio dan sejumlah surat kabar luar negeri, selain itu Pastor ini pula di Islamkan oleh Qahar Muzakkar. Setelah Kodam Hasanuddin tahu hal ini maka dengan cermat Jendral M. Jusuf dan Rais (bawahan Jendral Jusuf) membuat strategi penyelamatan. Dan pada pertemuan rahasia Rais dengan Vesterden membahas penyelamatannya menurut Rais, Vesterden harus berbohong

kepada pasukan DI/TII jika ia di culik. operasi senyap TNI berhasil dan membawa Pastor ini ke Lapangan Mandai Maros dan terbang ke Jakarta.

Banyaknya tokoh Darul Islam Sulawesi Selatan menyerah atau ditangkap, diantaranya Bahar Mataliu dan Usman Balo menyerah, serta Nurdin Piso tertangkap. Akhirnya disusul dengan gerakan Darul Islam Sulawesi Selatan. Penumpasan terhadap Darul Islam/Tentara Islam Indonesia ini termasuk rumit sebab negara harus membentuk dan melancarkan operasi militer dengan mengirimkan pasukan dari Divisi Siliwangi, bukan hal mudah dalam menumpas Pasukan Qahar ini dikarenakan Pasukan Tentara Islam Indonesia sudah mengenal baik medan pertempuran.

Perang, Strategi dan Negosiasi untuk meredam pemberontakan DITII di Sulawesi selatan terus dilakukan oleh pemerintah. Adapun negosiasi yang ditawarkan adalah pemberian amnesti dan “kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi” kepada pengikut Qahar Muzakkar dan hal ini mendapat respon yang baik oleh kebanyakan anak buah Qahar Muzakkar. Kondisi inilah yang memperkuat posisi pemerintah pusat dan sebaliknya, semakin mempersempit ruang gerak Darul Islam di Sulawesi Selatan. Gerakan Strategi pemerintah yang menggunakan masyarakat Sebagai sebagai alat untuk menjadikan isu bahwa yang melakukan berbagai tindak kejahatan dilakukan oleh pasukan DI/TII

terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Rasa tidak tenang dan aman menyebabkan sebagian masyarakat yang berada di daerah operasi DI/TII terutama mereka yang tidak mau bergabung (bekerja sama) terpaksa harus meninggalkan pemukimannya dan mengungsi ke daerah-daerah yang dianggap aman antara lain di mana tempat terdapat TNI.

Lemahnya posisi kekuatan gerilyawan Qahar Muzakkar semakin parah ketika Bahar Mattalioe sebagai wakil komandan pasukan Qahar Muzakkar menyerahkan diri. Sejak tahun 1960 (Zid & Sofjan, 2009: 43), kekuatan para pemberontak jauh melemah, kecuali di daerah pegunungan sekitar Gunung Latimojong di Luwu dan di sekitar Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1961, terjadi perundingan antara Jenderal Yusuf dan Qahar Muzakkar yang hampir membuahkan kesepakatan; sayang pertikaian tetap berlanjut setelahnya. Akhirnya, sisa-sisa pasukan TII dipaksa mundur ke Sulawesi Tenggara, di mana pada tanggal 1 Februari 1965 Qahar Muzakkar ditemukan di tempat persembunyiannya di Tepi Sungai Lasolo’ di Desa Laiyu Sulawesi Tenggara dan ditembak mati oleh Kopda Sadeli, prajurit dari Yon 330 Kujang I Siliwangi (Harvey, 1989: 316).

Setelah di selesaikannya DI/TII dan peristiwa G30S, kelompok-kelompok antikomunis melakukan konsolidasi kekuatan. Angkatan Darat bergerak cepat.

Selain terlibat langsung menumpas orang-orang PKI, mereka pun bekerja sama dan memfasilitasi kekuatan-kekuatan anti-PKI, salah satunya DI/TII. Dalam *The Second Front: Inside Asia's Most Dangerous Terrorist Network*, Ken Conboy menyebut pendekatan terhadap eks anggota DI/TII langsung dilakukan oleh bos Opsus, Ali Moertopo. Ali meyakinkan para mantan gerilyawan DI/TII untuk berdiri di kubunya dalam menghadapi PKI sebagai musuh bersama. Lewat beberapa orang kepercayaannya, di antaranya Aloysius Sugiyanto dan Pitut Soeharto, Ali menjanjikan fasilitas dan pengampunan jika eks pemberontak itu mau bekerja sama dengan tentara. Dan pada masa Orde Baru, pemerintah lewat BAKIN memfasilitasi reuni akbar eks anggota DI/TII di Situasken Bandung, sekitar 3000 lebih eks anggota DI/TII yang hadir dan pada pertemuan itu pula BAKIN mengajak peserta untuk masuk ke Golkar.

Jika memandang dalam sudut teori control sipil atas militer, Samuel Huntington berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat profesionalitas militer, maka akan semakin baik hubungan antara Sipil dan Militer. Dalam kasus DI/TII ini kita bisa melihat bagaimana rendahnya tingkat profesionalitas militer di daerah Sulawesi Selatan. Tentara pada saat itu juga jadi bandit kepada masyarakat sipil, tantara menjarah, merampas tanpa adanya landasan ideologi.

Perbedaan Ideologi anatar Darul Islam dengan Republik Indonesia dengan tujuan yang hampir sama untuk menciptakan negara baru, modern, dan menyingkirkan unsur-unsur terbelakang dari masa lalu, seperti *feodalisme*. DI melakukannya dengan cara mengkapanyekan melawan adat kebiasaan dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan Islam. Pada pihak RI, retorika yang mengilhami revolusi telah menjadi ideologi dominan negara baru. Pemerintah yang baru mengindonesiakan infrastruktur warisan kolonial, dan membangun negara baru yang modern, termasuk pertanian, pendidikan, kesehatan, median massa dan membentuk tantara yang professional.

## **PENUTUP**

Awal munculnya gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan disebabkan oleh kekecewaan Qahar Muzakkar yang memperjuangkan hak-hak pejuang Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) untuk masuk dalam Tentara Nasional Indonesia namun ditolak, serta Qahar Muzakkar sendiri meminta posisi sebagai Komandan divisi Hasanuddin di tolakpun oleh Pusat. Kekecewaan inilah yang dianggap sebagai "Siri" (dijatuhkan kehormatannya) oleh Qahar dan membuat pemberontakan di Sulawesi Selatan dan pada tahun 1952 bergabung dengan Darul Islam Kartosoewirjo yang bergerak di Jawa Barat. Pemerintah melakukan segala cara dalam meredam pemerontakan tersebut

salah satunya Negosiasi, perundingan-perundingan, serta operasi Tumpas. Setelah perundingan-perundingan yang dilakukan pemerintah tidak menuai titik terang, pemerintah kemudian membentuk Operasi Tumpas dalam menumpas Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Dalam Operasi Tumpas tersebut terdiri dari tantara divisi Siliwangi. Dalam operasi ini Tentara mengalami cukup hambatan disebabkan Qahar Muzakkar telah menguasai Medan Peran dan Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan ini berlangsung dari 1952 hingga 1965.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah dkk. (2018). Baraka: Basis Pertahanan DI/TII di Sulawesi Selatan (1953-1965). (*Jurnal Patingalloang*, 5(2), 51.
- Arsip Nasional Republik Indonesia: Inventaris Arsip pemerintah Propinsi Sulawesi 1950-1960 dan Koleksi Pribadi Muhammad Saleh Lahade 1937-1973.
- Bemmelen, S.V & Raben, R. (2011). Antara Daerah dan Negara Indonesia Tahun 1950an. Jakarta: KITLV-Jakarta
- Dematra, D. (2011). Kartosoewirjo Pahlawan atau Teroris, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum
- Esposito, J.L & Voll, J.O. (1999). Demokrasi di Negara-Negara Muslim. Bandung: Mizan
- Desch, M.C. (2002) Politisi vs Jendral: Kontrol Sipil atas Militer di Tengah Arus yang Bergeser. (Jakarta: PT Raja Grafindo Bersada)
- Harvey, B.S. (1989). Pemberontakan kahar muzakkar dari tradisi ke DI/TII. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Johari, H. Ketika DI TII Memburu PKI. Diakses tanggal 15 Mei 2019, dari: <https://historia.id/politik/articles/ketika-di-tii-memburu-pki-D8J2Q>
- Mantolas, S. Kartosoewirjo, Proklamator Negara Islam Indonesia. Diakses tanggal 13 Mei 2019, dari: <https://tirto.id/kartosoewirjo-proklamator-negara-islam-indonesia-bXqX>
- Matanasi, P. Sejarah Usang Khalifah Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Diakses tanggal 13 Mei 2019, dari: <https://tirto.id/sejarah-usang-khalifah-kahar-muzakkar-di-sulawesi-selatan-c99D>
- Mubarak, M.Z. (2015). Dari NII ke ISIS Transformasi Ideologi dan Gerakan Dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer. *Epistemé*, 10 (1), 81.
- Muradi. (2005). *Berpijak Diatas Bara, Kegamangan politik TNI pada Masa Transisi*. Bandung: Unpad Press.
- Ricklefs, M.C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2008). Hal. 507.
- Sandhaussen, U. (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967*, Jakarta: LP3ES, 1986
- Supyan, M.D, (2016) Gerakan Darul Islam (DI) S.M. kartosuwirjo di Jawa Barat dalam Mewujudkan Negara Islam Indonesia (NII) (1945-1962 M)
- Tanpa Nama. Pemberontakan DITII di Indonesia. Diakses tanggal 13 Mei 2019, dari: <http://www.nafiun.com/2014/03/pemberontakan-ditii-di-indonesia.html>
- Widia A.A dkk. (2018). Bulukumba di Tengah Pergolakan DI/TII 1952-1965. *Jurnal Patingalloang*, 5(2), 82
- Zid, M. & Sofjan S. (2009). Sejarah Perkembangan desa Bugis - Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Sejarah Lotara*, 6, (2). 43